

DATANG KE BANTUL WISATAWAN TAK LAGI BINGUNG

## Semua Obwis Ada di Aplikasi 'Resi Deswita'

**BANTUL (KR)** - Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, Selasa (2/11) meluncurkan Aplikasi Regrestasi Destinasi Wisata (Resi Deswita) yang bertujuan untuk mendata keberadaan dan kondisi objek wisata di Bantul.

Dengan peluncuran aplikasi tersebut, Bupati berharap destinasi wisata yang ada di Bantul akan terdata dan tercatat dengan baik sehingga dapat menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata Kabupaten Bantul.

Diungkapkan, saat ini Kabupaten Bantul memiliki sekitar 257 destinasi wisata berbasis budaya, alam dan buatan. Selain

itu 43 desa wisata, 10 desa budaya, 9 rintisan desa budaya, 16 museum, 1.200 kelompok seni budaya, 75 sentra UKM dan sekitar 1.200 kelompok seni budaya.

"Masih banyak pula potensi lain yang bisa menjadi produk andalan tersebut di seluruh Bantul. Sedangkan urutan produk domestik regional bruto pertama adalah industri, kedua pertanian dan ketiga pariwisata," ungkap Halim.

Menurut Bupati, karena besarnya potensi yang dimiliki sektor pariwisata yang ke depannya masih bisa dikembangkan, maka pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemkab Bantul setelah sektor industri dan pertanian.

Dengan pendataan destinasi wisata, pembangunan wisata akan memiliki arah tujuan yang jelas, karena sektor pariwisata juga efektif dan dapat diandalkan untuk mendukung

pemulihan ekonomi dan merupakan sektor pengungkit, serta mendorong menggeliatnya sektor lain seperti perdagangan dan industri.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwinarto Heru Prabowo SSos, menambahkan dengan diluncurkannya Aplikasi Resi Deswita ini akan memudahkan pendataan objek wisata di Bantul berkaitan dengan lokasi, pengelola, kepengurusan, bentuk wisata yang disajikan dan lainnya.

"Sehingga memudahkan pembinaan dan pengawasan untuk keamanan pengunjung dan tak lagi mem-

bingungkan mereka. Juga jangan sampai ada per-

saingan tidak sehat yang malah akan merugikan ob-

jek wisata itu sendiri," pungkask Kwinarto. (Jdm)-f



Bupati Bantul dalam peluncuran Aplikasi Resi Deswita Kabupaten Bantul.

KR-Judiman

MOU PEMKAB BANTUL DAN UAD

## BUMKal, Tangani Pengelolaan Sampah



KR-Jayadi Kastari

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dan Rektor UAD Dr Muchlas MT (tengah) menunjukkan naskah MoU.

**BANTUL (KR)** - Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sangat efektif untuk membantu Bank Sampah di setiap pedukuhan. Adanya BUMKal diharapkan dapat mewujudkan capaian penanganan sampah sebesar 70 persen dan mengurangi sampah 30 persen tahun 2025.

"Mari kita cengarkan gerakan Bantul Bersama Bersih Sampah 2025," jelas Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih saat Launching Model Pengelolaan Sampah Berbasis BUMKal di Kalurahan Potorono Banguntapan Bantul,

Rabu (3/11). Kegiatan diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Bantul bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Hadir dan memberi sambutan Rektor UAD Dr Muchlas MT, Ari Budi Nugroho ST MSc (Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul dan Anton Yudhana PhD (Kepala LPPM UAD). Dalam kesempatan dilakukan penandatanganan MoU penanganan sampah 2021 hingga 2025 antara Pem-

kab Bantul dengan UAD.

Rektor UAD Dr Muchlas MT, mengatakan UAD mendukung Bantul Bersama Bersih Sampah 2025. "UAD memiliki SDM mendukung program Bantul Bersama Sampah 2025," ucapnya.

Dalam program ini, UAD akan mendukung sistem informasi pengelolaan sampah, pemantauan kualitas udara dan air sungai-sungai di Bantul serta tenaga ahlinya. Selain itu, mahasiswa dan dosen UAD melakukan pendampingan pengelolaan sampah sampai tahun 2025. "Pendampingan bisa dengan KKN maupun penelitian dosen," ucapnya.

Sementara itu, Ari Budi Nugroho, mengatakan BUMKal dijadikan pusat pengelolaan sampah organik dan anorganik. Sampah organik dijadikan kompos untuk disalurkan pengguna kompos. Sampah anorganik diolah dan juga bisa digunakan kerajinan. "Sampah yang tidak dapat diolah berupa residu dikirim ke TPST Piyungan," ujarnya. (Jay/Roy)-f

LAKUKAN REVITALISASI LAYANAN

## KUA Sewon Jadi Jujugan Wilayah Lain

**SEWON (KR)** - Pasca-pencanangan revitalisasi layanan di KUA Kapanewon Sewon oleh Menteri Agama RI H Yaqut Cholil Qoumas. Sejumlah kantor kementerian agama melakukan studi banding di KUA Sewon. Salah satunya Kantor Kemenag Kabupaten Rembang.

Kepala KUA Sewon,

Mustafied Amna SAg MH, Rabu (3/11), mengatakan berbicara tentang revitalisasi KUA tentunya tidak lepas dari tiga aspek yakni unsur pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana. Kemudian penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) KUA.

"Ketiga atau terakhir ialah peningkatan standar

layanan prima KUA," ujarnya.

Sedang Kepala Kantor Kemenag Bantul, H Aidi Johansyah SAg MM, menyambut baik kunjungan studi banding dari jajaran Kamenag Kabupaten Rembang yang diterima di Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Sewon. Selain revitalisasi KUA Se-

won, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas juga mencanangkan Desa Sadar Keukunan bagi warga Karanggede Dagen RT 1, Pendowoharjo Sewon. Selain itu juga meluncurkan pojok wakaf uang digital di Pendapa Manggala Parasamya II Kompleks Pemda II Manding, Trirenggo Bantul. (Roy)-f

TETAP SINERGITAS DENGAN TNI-POLRI

## Masih Ada Warga Belum Mau Divaksin

**BANTUL (KR)** - Gugus Pengendalian Covid Bantul tetap meningkatkan sinergitas dengan TNI-Polri yang selama ini aktif dalam penanganan Covid-19, utamanya dalam gerakan vaksinasi massal.

Hal tersebut ditekankan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo selaku Ketua Gugus Pengendalian Covid Bantul pada rapat koordinasi, evaluasi dan tindak lanjut perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sewon, Selasa (2/11).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri

Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Kasat Pol PP Bantul, para panewu dan lurah di wilayah rawan pemaparan Covid.

Menurut Joko, rakor itu bertujuan untuk mencari masukan dan solusi terkait perkembangan penyebaran Covid-19, agar ada persamaan persepsi maupun langkah, tindakan dan penanganan untuk penanggulangan Covid di semua wilayah.

Diakui, ada beberapa kendala yang dialami panewu maupun lurah, di antaranya masih ada warga yang belum bersedia divaksin. Selain itu

juga terkait izin penyelenggaraan kegiatan atau izin keramaian seperti pertunjukan kesenian dan hajatan serta capaian vaksinasi dan peta wilayah sebaran penularan Covid-19 setiap kapanewon.

Dalam kesimpulannya, menurut Joko perlu ada surat izin dari panewu dan lurah bagi masyarakat yang akan mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Perkuat vaksinasi bagi seluruh warga untuk pembentukan herd immunity. Mengoptimalkan jaga warga dan pelaksanaan disiplin proses. (Jdm)-f

## Kadin DIY dan Sampoerna Genjot Vaksinasi

**BANGUNTAPAN (KR)** - Kadin DIY terus mendukung pemulihan ekonomi DIY dengan percepatan vaksinasi. Didukung CSR Sampoerna, Kadin DIY bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan Wirokerten Banguntapan Bantul menggelar Vaksinasi Dosis 1 Sinopharm, di Ringroad Selatan Dusun Muthian RT 05 Wirokerten, Sabtu (30/10).

"Sebanyak 500 warga Kalurahan Wirokerten yang mengikuti vaksin juga mendapatkan paket sembako," tutur Komite Tetap Pengembangan Sekretariat Kadin DIY Timothy Aprianto.

Didampingi Camat Banguntapan I Nyoman Gunarsa SPSi MPsi, Lurah Wirokerten Rakhmawati Wijayaningrum SE dan Kepala Departemen Hubungan Regional dan Ke-



KR-Juvintarto

Kegiatan vaksinasi kerja sama Kadin DIY-Sampoerna di Wirokerten Banguntapan.

berlanjutan PT HM Sampoerna Tbk Kukuh Dwi Kristianto, Timothy menyebut saat ini vaksinasi merupakan salah satu game changer penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi dan Dirut PT Yogyakarta Tembaku Indonesia GKR Cendrokiro-

no, juga hadir dan mengapresiasi percepatan vaksinasi untuk pemulihan ekonomi.

"Vaksinasi kini bukan hanya alat melindungi, tapi juga menjadi syarat akses mobilitas penduduk dengan akses PeduliLindungi, harapannya ekonomi masyarakat bergerak. Warga Wirokerten 90

persen lebih telah divaksin dan penurunan penularan Covid-19 signifikan," ungkap Lurah Wirokerten Rakhmawati.

Senada Camat Banguntapan, I Nyoman Gunarsa, menyebutkan sebagai daerah dengan mobilitas warga yang sangat tinggi, angka penularan Covid-19 di Banguntapan sempat tinggi tapi saat ini sudah terkendali dan menurun drastis. "Herd Immunity di kisaran 90-95 persen, dan kita harapkan cepat 100 persen," ujarnya.

Sedang Kukuh menyatakan CSR PT Sampoerna Tbk dengan vaksin Sinovam karena aman untuk lansia dan difabel. "Kita mendukung herd immunity di Bantul cepat tercapai, hari ini ditambah masyarakat.umum kita targetkan bisa mencapai 800 peserta," tegasnya. (Vin)-f

## Pak Asmuni Menjawab



### Berbuat Baik dan Jahat (2-Habis)

TANYA:

Dalam suatu pengajian penceramah menyatakan bahwa sikap, kehendak dan perbuatan yang nampaknya ringan akan besar artinya di hadapan Allah SWT. Sayang, penceramah itu tidak (sempat) menyertakan dasar-dasar atau dalilnya. Mohon penjelasan.

Pangghil, Gunungkidul

JAWAB:

Mengenai orang-orang yang berbuat tidak baik akan mendapatkan siksa di akhirat kelak disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi yang awalnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Arti hadis tersebut ialah, ada empat macam nasib orang-orang yang karena perbuatannya tidak akan dapat masuk surga.

Mereka itu ialah: (1). Orang-orang yang menjual barang-barang dagangan yang pada waktu menjualnya banyak berteriak dan

banyak bersumpah agar dagangannya laku. (2). Orang-orang fakir tetapi dia tidak tahu bahwa nasib fakir itu merupakan cobaan Allah sehingga ia bersikap sombong. Bukannya justru bersabar dan banyak memohon kebaikan kepada Allah SWT.

(3). Orang-orang yang sudah tua (sepuh) dan banyak berbuat zina. (4). Orang-orang yang jadi pemimpin tidak adil yang banyak melakukan kecurangan.

Terdapat satu hadis lagi riwayat Al-Hakim yang awalnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis itu artinya, ada empat kriteria orang yang Allah tidak menetapkannya masuk surga. Mereka adalah orang yang selalu minum khamer, orang yang usahanya menempuh sistem riba, orang yang tidak jujur dan adil serta banyak makan harta anak yatim, orang yang banyak menentang atau tidak berbakti kepada kedua orangtuanya. □f

## Kampus Merdeka vs Kampus Terjajah



Dyah Fitriani, SE, MM  
Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM** Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi isu yang banyak diperbincangkan perguruan tinggi saat ini. Beberapa waktu yang lalu Menteri Nadiem menyebutkan bahwa masih banyak pengelola program studi melakukan kesalahan

terkait aturan pelaksanaan MBKM. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud menargetkan lulusan perguruan tinggi memiliki multitalented supaya sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia kerja. Ide ini tentu saja menarik untuk dikawal. Namun kondisi di lapangan ternyata tidak sepenuhnya mendukung ide ini. Pemahaman terkait pelaksanaan konversi nilai atau rekognisi program-program MBKM masih belum menemukan titik temu pada beberapa program studi. Beberapa program studi masih meyakini bahwa lulusan harus memenuhi kompetensi keprofesionalnya. Jadi ada ketidakselarasan antara arah

pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan (generalisasi) dengan kebijakan pengelola perguruan tinggi yang selama ini menggunakan konsep spesialisasi dalam penyusunan kurikulum.

Permasalahan terkait program MBKM yang tidak dapat dikonversi ke mata kuliah telah diantisipasi beberapa perguruan tinggi dengan melakukan rekognisi pada kegiatan yang akan dicatatkan dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Tentu saja konsekuensi dari kebijakan tersebut bisa jadi membuat masa studi mahasiswa menjadi lebih lama

karena mahasiswa tertinggal 1 atau 2 semester karena fokus mengikuti program MBKM. Dilema ini yang dirasakan pengelola perguruan tinggi ketika akan merekognisi program MBKM dalam SKPI. Solusi yang dapat diambil oleh perguruan tinggi adalah pertama, mengubah mindset bahwa saat ini terjadi perubahan tuntutan dari dunia industri dan dunia kerja. Dalam bisnis tidak hanya 1 kompetensi yang diperlukan untuk memenangkan persaingan tapi perlu beberapa kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Focus Group Discussion (FGD) bisa dilakukan dengan mengundang kalangan industri

dan dunia kerja untuk lebih memahami kompetensi sesungguhnya yang mereka butuhkan. Tracer study juga perlu diintensifkan supaya dapat menjangkau profil lulusan lima tahun terakhir seperti apa. Kedua, merombak kurikulum jika diperlukan. Kurikulum yang dimiliki beberapa perguruan tinggi saat ini merupakan kurikulum yang masih mengarah ke spesialisasi bukan generalisasi seperti yang diharapkan Kemendikbud. Dengan demikian perguruan tinggi tidak menjadi kampus yang terjajah. Terjajah oleh tuntutan industri di masa lalu.

Menjadi kampus merdeka

atau kampus terjajah adalah sebuah pilihan. Seperti halnya seorang pahlawan yang ingin memerdekakan negaranya maka beberapa hal harus diupayakan untuk diperjuangkan. Perjuangan ini tentu memerlukan pengorbanan dan strategi yang tepat. Kemendikbud telah menyelenggarakan berbagai program yang mendukung pelaksanaan MBKM diantaranya Program Kerja Sama Kurikulum Implementasi (KSKI) MBKM. Program ini ditujukan untuk membantu program studi supaya lebih memahami esensi dari Kurikulum MBKM. Hanya saja di lapangan masih ada beberapa program studi yang



belum memahami apa yang harus mereka kerjakan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kemendikbud untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan melalui program-program serupa. Harapannya best practice yang sudah dilaksanakan di suatu perguruan tinggi dapat dijadikan contoh bagi perguruan tinggi lain. Dengan demikian tidak ada lagi istilah kampus terjajah, yang ada hanyalah kampus merdeka yang dikemudian hari dapat diakui eksistensinya di dunia usaha dan dunia industri. \*\*\*